

## **DINAMIKA KOALISI PKB DAN GERINDRA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018**

**Oleh : Erla Wepa Afrilia**

**Email: erlawepaafria@gmail.com**

**Pembimbing: Drs. M. Y.Tiyas Tinov, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293-Telp/Fax 0761-63272

### **ABSTRACT**

*Election of regional heads (Pilkada) is carried out directly by the people of the local administrative regions who meet the requirements. Election of regional head and deputy regional head (Pilkada), one element that cannot be left out is the importance of the existence of political parties. Riau Province is one of the provinces that held a democratic party to elect the Governor and Deputy Governor on 27 June 2018. There are four candidate pairs in the 2018 Riau regional head election, one of them is the pair with the second order number, Lukman Edy and Hardianto. This coalition is supported by two parties namely PKB and Gerindra. This coalition was formed at the deadline and a new figure from Gerindra, Hardianto, was chosen to accompany Lukman Edy in the Riau regional elections in 2018. However, the results of the couple's vote was the lowest of the three other pairs.*

*This study aims to determine the dynamics of the formation of the PKB and Gerindra coalition in the Regional Head election in Riau Province in 2018 and to find out the causes of the PKB and Gerindra coalition defeat in the Regional Head election in the Province of Riau in 2018. Furthermore, the data sources used in this study are primary data and secondary data. Data collection methods used in this study were interviews and documentation.*

*The results of this study are the PKB and Gerindra coalition which leads to Arent Lijphart's theory of bargaining proposition because it was formed at the end of time with a small number of coalitions remaining. Hardianto was present because the Gerindra exchange rate was only as Deputy Governor. The defeat of Lukman Edy and Hardianto's coalition included the weak figure of Hardianto, carried by two middle parties while its opponents are carried by several parties, there is no regeneration of PKB figures, less solid political machinery and less mature coalitions, the smallest campaign budget funds.*

**Keywords: Dynamics, Coalition, Political Parties, Riau Regional Head Election**

## Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah dilakukan langsung oleh rakyat daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket dengan Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

Hanya ada dua jalan untuk mewujudkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2018-2023. Pertama jalur partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen)

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Adapun jumlah kursi di DPRD Riau berjumlah 65 buah, berapa kursi yang diperlukan untuk bisa maju menggunakan jalur ini, 20 persen dari 65 kursi DPRD Provinsi Riau berarti 13 kursi dikuasai barulah keinginan untuk menjadi calon kepala daerah itu bisa diwujudkan. Kedua, yaitu dengan calon independen.

Fraksi atau gabungan fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari jumlah kursi DPRD atau dua puluh lima persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

**Tabel 1.1 Jumlah Kursi Partai di DPRD Provinsi Riau Pada Pemilu 2014**

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase
1.	GOLKAR	14 Kursi	21,5
2	PDIP	9 Kursi	13,8
3.	DEMOKRAT	9 Kursi	13,8
4.	GERINDRA	7 Kursi	10,7
5.	PAN	7 Kursi	10,7
6.	PKB	6 Kursi	9,2
7.	PPP	5 Kursi	7,6
8.	PKS	3 Kursi	4,6
9.	NASDEM	3 Kursi	4,6
10.	HANURA	3 Kursi	4,6
<b>Total</b>		<b>65 Kursi</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Penulis 2019*

Berdasarkan tabel diatas, diantara 10 partai politik itu hanya Partai Golkar merupakan partai yang memiliki suara paling besar yaitu 14 kursi. Partai Golkar bisa maju ke

Pilkada karena sudah memenuhi syarat minimal pencalonan yaitu 13 kursi atau 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada, sedangkan 9 partai politik lainnya

harus berkoalisi dengan partai lain kepala daerah 2018. untuk bisa mengikuti pemilihan

**Tabel 1.2 Daftar Calon Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018**

No Urut	Pasangan Calon	Partai Politik
1	Syamsuar dan Edy Nasution	PKS, PAN, dan Nasdem
2	Lukman Edy dan Hardianto	PKB dan Gerindra
3	Firdaus dan Rusli Effendi	Demokrat dan PPP
4	Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno	GOLKAR, PDI P, dan Hanura

Sumber :*Data Olahan Penulis 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pasangan dengan nomor urut satu adalah pasangan Syamsuar dengan Edy Nasution dengan diusung oleh koalisi partai PKS, PAN dan Nasdem. Pasangan dengan nomor urut dua yaitu Lukman Edy dan Hardianto yang diusung oleh koalisi partai PKB dan Gerindra. Selanjutnya pasangan dengan nomor urut tiga yaitu pasangan Firdaus dan Rusli Effendi yang diusung oleh koalisi partai Demokrat dan PPP. Terakhir adalah pasangan dengan diusung oleh koalisi partai PKB dan Gerindra. Selanjutnya pasangan dengan nomor urut tiga yaitu pasangan Firdaus dan Rusli Effendi yang diusung oleh koalisi partai Demokrat dan PPP. Terakhir adalah pasangan dengan nomor urut empat yaitu Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno yang diusung oleh koalisi partai Golkar, PDI P dan Hanura.

Berdasarkan penjelasan diatas ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Koalisi antara Lukman Edy dan Hardianto terbentuk pada batas akhir pendaftaran ke KPU.

2. Figur Lukman Edy dan Hardianto yang tidak sekuat pasangan kandidat lain.
3. Koalisi partai PKB dan Gerindra yang cukup besar mengusungkan kandidat calon Gubernur tidak berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah.

Fenomena diatas menjelaskan pertama, partai ini berkoalisi dihari terakhir pendaftaran tepatnya pada malam terakhir pendaftaran sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai terbentuknya koalisi Lukman Edy dan Hardianto. Kedua, elektabilitas pasangan Lukman Edy dan Hardianto tidak terlalu tinggi dibandingkan kandidat lainnya yang sebagian besar merupakan mantan kepala daerah. Ketiga, koalisi antara Lukman Edy dan Hardianto mendapatkan suara yang paling rendah dari 4 total 4 pasang calon, ini berarti kinerja mesin politiknya tidak optimal karena PKB dan Gerindra merupakan partai yang cukup terkenal di Riau. Dengan demikian penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Dinamika Koalisi PKB Dan Gerindra Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.”**

## Rumusan Masalah

Koalisi PKB dan GERINDRA pada pemilihan kepala daerah Provinsi Riau tahun 2018 merupakan koalisi yang dibentuk untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Koalisi ini memiliki keunikan yaitu pertama, secara nasional PKB dan GERINDRA merupakan partai yang berseberangan. Kedua, koalisi ini terbentuk dalam waktu yang singkat. Dari penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana dinamika koalisi PKB dan Gerindra pada pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau tahun 2018.
2. Apa faktor-faktor penyebab kegagalan koalisi PKB dan

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Akademis  
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Praktis  
Penelitian ini dapat memberikan rujukan pengambilan kebijakan partai politik atau kandidat dalam Pilkada.

## Kerangka Teori

### 1. Konsep Dinamika

Menurut Slamet Sentosa, dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara

Gerindra pada pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau tahun 2018.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dinamika koalisi PKB dan Gerindra pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan koalisi PKB dan Gerindra pada pemilihan kepala daerah Provinsi Riau tahun 2018.

timbang balik. Jadi, dinamika berarti adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok terus menerus berada dalam kelompok itu. Oleh karena itu kelompok tersebut harus bersifat dinamis, artinya setiap kelompok yang bersangkutan dapat berubah.<sup>1</sup>

### 2. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara serta memelihara keutuhan

---

<sup>1</sup>Slamet Santoso, 2009, *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm: 5-6.

NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup>

Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.<sup>3</sup>

### 3. Teori Koalisi

Secara harfiah pengertian koalisi adalah penggabungan. Koalisi merupakan kelompok individu yang berinteraksi yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi masalah atau isu, memfokuskan pada tujuan di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota. Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang menganut sistem multipartai.<sup>4</sup>

Mengacu pada teori Arent Lijphart, setidaknya terdapat empat teori koalisi yang bisa diterapkan di Indonesia, yaitu<sup>5</sup>:

1. *Minimal Winning Coalition* prinsip dasarnya ialah maksimalisasi kekuasaan.

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu dan Partai Politik.

<sup>3</sup>Adlin, 2012, *Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum*, Pekanbaru: Alaf Riau, hlm: 10.

<sup>4</sup>Arent Lijphart, 2009, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensiil*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm: 51.

<sup>5</sup>*Op.Cit.*, Arent Lijphart, hlm: 61.

Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi.

2. *Minimal Size Coalition* yaitu, partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.
3. *Bargaining Proposition*, yakni koalisi dengan jumlah partai paling sedikit. Prinsip utamanya ialah untuk memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar karena rekan koalisi yang sedikit.
4. *Minimal Range Coalition*, dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai untuk berkoalisi membentuk kabinet. Koalisi ini sering diterapkan dalam dunia nyata. Dasar koalisi ini lebih dikarenakan masing-masing partai yang berkoalisi memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif kualitatif pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan

atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, tepatnya di kantor DPW PKB dan kantor DPD GERINDRA. Penelitian ini mengenai koalisi PKB dan Gerindra pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau tahun 2018. Alasan memilih lokasi ini adalah:

1. Provinsi Riau melakukan pemilihan kepala daerah untuk menentukan Gubernur dan wakil Gubernur Riau pada tahun 2018.
2. Karena semua informan yang ada dalam penelitian ini berada di Provinsi Riau.

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang di tempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Salah satunya dengan prosedur *purposive* yaitu salah satu strategi menentukan informan yang paling umum dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka ataupun dengan memanfaatkan sarana komunikasi. Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder yang terkait dinamika koalisi PKB dan Gerindra pada pemilihan kepala daerah Provinsi Riau

tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan analisi kualitatif. Analisi data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata bukanrangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klarifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alit-tulis), tetapi analisa kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

## **Pembahasan**

### **1. Dinamika Koalisi PKB dan Gerindra pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018**

PKB merupakan satu dari 10 partai yang meraih kursi di DPRD Provinsi Riau pada pemilihan umum 2014 lalu. PKB memperoleh 6 kursi dari total 65 kursi DPRD Provinsi Riau tahun 2014. Untuk maju ke pilkada 2018, PKB harus melakukan koalisi dengan partai lain dengan jumlah minimal koalisi 13 kursi. Pada Pilkada 2018, PKB tidak membuka penjangkaran, karena kader PKB yaitu Lukman Edy merupakan kader yang berprestasi dan berpengaruh yang dimiliki oleh PKB saat itu. Lebih baik lagi PKB menggunakan kesempatan yang ada untuk meraih kemenangan pada Pilkada 2018. Sejak awal 2017 PKB sudah menunjuk Luman Edy untuk maju ke Pilkada 2018. Lukman Edy pada Pilkada Riau 2018 ditunjuk untuk maju sebagai calon Gubernur. PKB dalam menentukan kandidatnya

menggunakan sistem penunjukan, dimana pihak pusat atau DPP langsung menunjuk Lukman Edy untuk maju ke pilgubri tahun 2018 mewakili PKB. Penunjukan ini sebenarnya atas rekomendasi dari DPC yang kemudian diusulkan DPW ke DPP, barulah pihak DPP memutuskan dengan mengeluarkan surat keterangan. Sebelumnya PKB melakukan penjaringan internal, penjaringan ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh PKB Provinsi Riau. Dari sana terdapat beberapa nama yang akan di survei. Dari hasil survei tersebut akhirnya keluar nama Lukman Edy sebagai kader yang memiliki nilai jual tinggi.

Sebelum melakukan koalisi dengan Gerindra, PKB pernah melakukan pendekatan ke beberapa partai lainnya, begitupun sebaliknya ada beberapa kandidat juga melakukan pendekatan ke Lukman Edy. Banyak yang harus dipertimbangkan untuk menemukan pasangan yang satu tujuan dan memperoleh kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak. Hal ini yang membuat proses pendekatan dan komunikasi memakan waktu yang lama.

Setelah melakukan komunikasi dengan banyak Partai, kesempatan untuk menjadi calon Gubernur Riau pun tinggal sedikit. Beberapa pasangan sudah memutuskan untuk berkoalisi bahkan sudah ada yang mendaftarkan diri ke KPU. Dari semua partai yang memiliki kursi di legislatif, yang tersisa hanyalah Gerindra sedangkan waktu yang tersisa hanya beberapa hari lagi. KPU membuka pendaftaran pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sejak 8 Januari 2018 sampai 10 Januari 2018. Lukman Edy berusaha mencapai kesepakatan dengan Gerindra dengan waktu yang tersisa.

PKB dan Gerindra sempat alot dalam memperoleh kesepakatan. Karena sejak awal Gerindra memutuskan Nurzahedi untuk maju ke pemilihan kepala daerah Riau 2018, dan PKB juga sejak awal mengusung Lukman Edy untuk maju menjadi calon Gubernur. Kedua partai ini ingin menduduki posisi “satu”, sedangkan salah satu dari mereka harus mengalah agar ada yang menjadi wakil. Nurzahedi pun mundur, karena jika untuk menduduki posisi wakil beliau tidak mendapatkan izin dari DPP karena saat itu posisi Nurzahedi juga anggota DPR RI. Ketika Nurzahedi mundur, maka Gerindra mencari kadernya untuk dipasangkan dengan Lukman Edy.

PKB dan Gerindra akhirnya sepakat akan maju ke pemilihan kepala daerah Riau. PKB sejak awal mengusung Lukman Edy maju sebagai calon Gubernur, maka dari pihak Gerindra memberikan wakil untuk Lukman Edy. Karena nilai tawar Gerindra pada saat itu hanya untuk calon, sedangkan diawal Gerindra mengusung Nurzahedi, maka Nurzahedi memilih untuk mundur. Setelah ada komunikasi di DPP. Berhubung dengan waktu pendaftaran hampir tutup dan pasangan lain sudah mendaftar, maka pihak masing-masing DPP melakukan komunikasi ditingkat pusat. Komunikasi ini menghadirkan sosok baru yaitu Hardianto, Hardianto yang merupakan Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Riau ditunjuk sebagai wakil dari Lukman Edy untuk maju ke pemilihan kepala daerah Riau tahun 2018. Hardianto pun dipanggil ke pusat oleh DPP bersama Nurzahedi pada tanggal sembilan malam untuk menghadap Bapak Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Malam itu juga surat keputusan bahwa Hardianto

mendampingi Lukman Edy mewakili PKB dan Gerindra untuk maju sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur. Hardianto diperintahkan untuk maju mendampingi Lukman Edy dengan disidorkannya surat keputusan dari DPP Gerindra Nomor 01-631/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2018 TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR. Begitupun dengan Lukman Edy yang menerima surat keputusan dari DPP PKB Nomor 25386/DPP-03/VI/A.2/1/2018 TENTANG PERSETUJUAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Koalisi PKB dan Gerindra pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau tahun 2018**

### **Faktor Partai Pendukung.**

Partai politik memiliki posisi penting dalam pencalonan kandidat pemimpin daerah, meskipun dimungkinkan lewat jalur perseorangan atau independen. Walaupun demikian, sebagian besar kandidat maju melalui jalur partai politik, baik diajukan partai politik pengusung sendiri maupun koalisi. Besarnya sebuah partai di daerah mempengaruhi perhatian masyarakat. Jika partai tersebut memiliki suara yang besar di legislatif, tentu pada pemilihan kepala daerah juga mempengaruhi suara, walaupun tokoh juga mempengaruhi penilaian masyarakat. PKB dan Gerindra adalah dua partai menengah di Riau, sehingga koalisi ini bisa dibilang kecil dibandingkan lawannya koalisi dua partai besar seperti Golkar dan PDI P.

### **Figur Lukman Edy**

pemilih Indonesia lebih memperhitungkan figur daripada program, ideologi atau faktor lain. Dari variabel figur setidaknya ada dua yang menjadi daya tarik masa, yaitu penampilan dan rekam jejak. Sering kali partai politik tidak cukup memberikan kesempatan kepada kader mereka lainnya untuk maju dalam pilkada langsung. Dalam hal ini, yang dipertimbangkan oleh partai politik adalah bagaimana mereka bisa memenangkan pemilihan kepala daerah langsung. Karena dengan memenangkan pemilihan kepala daerah langsung, mereka bisa menguasai sumber kekuasaan di daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka mereka akan cenderung mencari figur yang memiliki potensi tinggi untuk menang. Majunya Lukman Edy untuk kedua kalinya membuat masyarakat jenuh.

### **Figur Hardianto**

Figur Hardianto merupakan wajah baru di pemerintahan, sebelumnya Hardianto belum pernah memegang jabatan sebagai kepala daerah. Sebelum mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur Riau, Hardianto merupakan anggota DPRD Riau. Figur Hardianto bukanlah figur yang dikenal oleh masyarakat Provinsi Riau. Sehingga kurang bisa menyeimbangi lawan-lawannya yang berpengalaman menjadi kepala daerah. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pemilihan kepala daerah, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

### Anggaran Kampanye Paling Kecil

Dana kampanye tidak bisa dihindari ketika pemilihan kepala daerah. Segala kegiatan yang dilakukan untuk kampanye memerlukan uang. Apalagi Hardianto merupakan figur baru dalam pemerintahan Riau. Salah satu faktor

kekalahan pasangan Lukman Edy dan Hardianto adalah kecilnya dana kampanye. Kampanye adalah usaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, media cetak, media massa, dll. Kampanye membutuhkan banyak dana apalagi daerah kampanye satu Provinsi dari kota hingga ke Desa.

### 3.1 Anggaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2018.

No Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah	Jumlah Pengeluaran
1	Drs. H. Syamsuar, M.Si dan H. Edy Nasution	Rp. 5.001.307.240
2	Muhammad Lukman Edy, M.Si dan Hardianto S.E	Rp. 555.000.000
3	Dr.h. Firdaus, ST.MT dan H. Rusli Effendi, S.E, S.Pd.i, M.Si	Rp. 2.252.496.490
4	Ir. H. Arsyadjuliandi Rahman, MBA dan H. Suyatno, AMP	Rp.2.347.613.501

Sumber: KPUD Provinsi Riau 2019

Berdasarkan tabel diatas, pasangan Lukman Edy dan Hardianto mengeluarkan dana kampanye sebanyak Rp. 555.000.000. Diantara dana kampanye keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dana kampanye pasangan Lukman Edy dan Hardianto yang paling rendah. Dana kampanye yang paling besar adalah dari pasangan nomor urut satu yaitu Syamsuar dan Edy Nasution yaitu Rp. 5.001.307.240. Selanjutnya pasangan nomor urut empat yaitu Arsyadjuliandi Rahman menghabiskan dana sebanyak Rp. 2.347.613.501. Berikutnya pasangan nomor urut tiga menghabiskan dana sebesar Rp.2.252.496.490.

#### 3. Diskusi Teoritik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *bargaining Proposition*, yakni koalisi dengan

jumlah partai paling sedikit. Prinsip utamanya ialah untuk memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar karena rekan koalisi yang sedikit. Teori yang digunakan dalam analisa ini bermaksud untuk memahami bagaimana dinamika koalisi PKB dan Gerindra pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 melalui konsep dinamika dan teori koalisi. Serta apa penyebab kegagalan koalisi PKB dan Gerindra pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 menggunakan teori koalisi.

Dinamika koalisi PKB dan Gerindra sangat singkat. Sebelum berkoalisi, masing-masing partai sudah melakukan pendekatan ke partai politik lainnya. Karena dinamika selalu berubah seiring berjalannya waktu apalagi untuk membentuk sebuah koalisi membutuhkan banyak

pertimbangan yang mana kedua belah pihak memperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu pembentukan koalisi berisikan negosiasi yang alot dan saling menguntungkan para petinggi partai. Koalisi antara PKB dan Gerindra juga sempat alot karena dari koalisi tersebut harus menguntungkan kedua partai.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyajikan kesimpulan dari koalisi PKB dan Gerindra pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau tahun 2018 sebagai berikut:

1. Dinamika koalisi PKB dan Gerindra mengarah ke teori *bargaining proposition* yang merupakan koalisi dengan jumlah partai paling sedikit. Prinsip utamanya memudahkan proses tawar menawar karena rekan koalisi yang sedikit. Dinamika sempat alot, karena ada beberapa kepentingan yang belum bisa disepakati. Sebelumnya kedua partai sudah melakukan berbagai pendekatan dengan partai lain. PKB dari awal menunjuk Lukman Edy untuk maju. Lukman Edy sudah melakukan deklarasi maju sebagai calon Gubernur dengan memasang baliho. Sedangkan Gerindra diawal mempersiapkan Nurzahedi untuk maju ke Pilkada Riau. Namun seiring berjalannya waktu, sudah banyak koalisi yang terbentuk. Akhirnya yang tersisa adalah PKB dan Gerindra, kedua partai ini

memutuskan untuk berkoalisi dan dari Gerindra mengusung Hardianto untuk menjadi pasangan Lukman Edy.

2. Beberapa faktor penyebab kekalahan pasangan Lukman Edy dan Hardianto adalah faktor partai pendukung yang kurang solid tidak mampu menggerakkan mesin partai, figur Lukman Edy, figur Hardianto kurang dikenal oleh masyarakat Riau, dan dana kampanye yang kecil yang dapat mempengaruhi kelancaran proses kampanye.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka penulis berusaha untuk memberikan saran yang bisa dijadikan pertimbangan:

1. Sebaiknya koalisi dilakukan dengan pertimbangan yang baik dengan memperhatikan kesamaan visi dan misi untuk Provinsi Riau lebih baik lagi.
2. Maju ke pemilihan kepala daerah dengan mengusung calon sebaiknya partai politik melakukan survei internal dengan memperhatikan kualitas calon, agar bisa memilih calon pemimpin yang berkualitas dan memikul amanah masyarakat Riau. Partai politik harus bekerja dengan baik karena mesin politik yang bertugas meningkatkan popularitas pasangan calon Gubernur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adlin. 2012. *Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. cetakan ke-14. Jakarta: Rineka Cipta.

Liphart, Arent. 2009. *Sistem Pemerintahan Parlemeter dan Presidensiil*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Cipto, Bambang. 2000. *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miriam Budiardjo. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munir, Baderel. 2001. *Dinamika Kelompok, Penerapannya dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Pamungkas, Sigit. 2012. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

Santoso, Slamet. 2009. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zulkarnain, Wildan. 2014. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.

### Jurnal dan Skripsi

Rahmadani Sinuraya, Syahri. 2017. *Kekalahan Calon Independen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol.4, No.2.

Setyadi, Dery. 2017. *“Strategi Koalisi Partai Terhadap Pemenangan Pasangan Haris-Zardewan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015”*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol.4, No.2.

Sundari Fauziah, Rhesty. 2016. *Strategi Koalisi Partai Politik dalam Pemenangan Pasangan Zulkifli AS dan Eko Suharjo pada PEMILUKADA di Kota Dumai Tahun 2015*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau, Vol. 3, No. 2.

Tamma, Sukri, 2013, *Koalisi Politik di Indonesia Pasca Soeharto*, Universitas Hasanuddin Makassar.

### Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3497898/lukman-edy-siap-maju-kembali-di-pilgub-riau-2018>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 21.30

<https://news.detik.com/berita/3807410/akhirnya-pkb-dan-gerindra-usung-lukman-edy-hardianto-di-pilgub-riau>, diakses pada

tanggal 23 Agustus 2019 pukul 21.40

<https://mediaindonesia.com/read/detail/1/108507-lukman-edy-daftar-ke-nasdem-untuk-pilkada-riau>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 08.30

<https://news.okezone.com/read/2018/01/11/340/1843280/lukman-edy-hardiyanto-daftar-ke-kpu-riau-jelang-waktu-penutupan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 20.10

<https://www.goriau.com/berita/baca/ditanya-kesiapan-maju-di-pilgubri-2018-edy-tanjung-kita-ikuti-seperti-air-mengalir.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 20.20

<https://www.liputan6.com/pilkada/read/3295157/lukman-edy-hardianto-gunakan-jurus-pahe-selama-kampanye>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 20.30

### **Peraturan**

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu dan Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juga diungkapkan mengenai mekanisme pemilihan langsung terhadap kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.